KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

VOL. 11 NO. 2 | APRIL-JUNI 2026

POLICY BRIEF

Diplomasi Olahraga: Amplifier Kemitraan Strategis Indonesia dan Kawasan Amerika Latin dan Karibia

Kebijakan Local Currency Transaction (LCT) sebagai Instrumen Strategis bagi Indonesia

DEWAN REDAKSI

PENGARAH
KEPALA BSKLN

PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS BSKLN

PEMIMPIN REDAKTUR
APUL SIHOMBING

REDAKTUR
1. YOHANA I. MAHARLIKA
2. REINHARDT KLAUSSURINKA
3. M. FATTAH H.H
4. SULTHON SJAHRIL

EDITOR
1. KARIMA TAUSHIA A
2. YUDHI MUHAMMAD F.R
3. ALDILA AVEZINE
4. ERRY HERJUNO
5. VIA FIDE ADITYA A.R

SEKRETARIAT
1. ACHRAM IVEL
2. NURUL UTAMI
3. PURWADI
4. NURMASELLA P



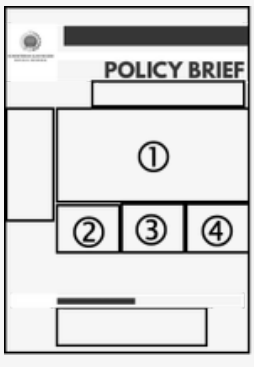






BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG ROESLAN ABDUL GHANI, LANTAI 2
JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, 10110
TELP : (021) 3441508



SUMBER GAMBAR / FOTO

1. Bambang. (2026, 16 April). PSSI–FFF perkuat kerja sama sepak bola putri, fokus pembinaan usia muda dan kesetaraan gender. IPOL.ID. https://ipol.id/2026/04/pssi-fff-perkuat-kerja-sama-sepak-bola-putri-fokus-pembinaan-usia-muda-dan-kesetaraan-gender/
2. Rahma Putri, A. D. (2026, 22 April). Perluas jaringan global, Bank Indonesia luncurkan QRIS di Tiongkok akhir April 2026. Disway Malang. https://malang.disway.id/bisnis-keuangan/read/13485/perluas-jaringan-global-bank-indonesia-luncurkan-qris-di-tiongkok-akhir-april-2026
3. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, 17 Mei). Presiden apresiasi kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia di SEA Games 2023. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/presiden-apresiasi-kemenangan-timnas-sepakbola-indonesia-di-sea-games-2023/
4. Masitoh, S. (2025, 27 Juli). Transaksi Local Currency Transaction capai US$ 11,7 miliar di semester I 2025. Kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/transaksi-local-currency-transaction-capai-us-117-miliar-di-semester-i-2025

POLICY BRIEF

Diplomasi Olahraga: Amplifier Kemitraan Strategis Indonesia dan Kawasan Amerika Latin dan Karibia

DISETUJUI UNTUK PUBLIKASI

Ringkasan Eksekutif

Diplomasi olahraga memiliki potensi strategis memperkuat soft power Indonesia di kawasan Amerika Latin dan Karibia melalui penguatan people-to-people contact, nation branding, serta perluasan kerja sama ekonomi, pariwisata, pendidikan, industri kreatif, dan diplomasi digital. Survei BSKLN tentang Pengenalan dan Proyeksi Kemitraan Strategis Indonesia dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Kanada dan hasil diskusi Focus Group Discussion "Optimalisasi Soft Power Diplomacy Indonesia melalui Infrastruktur Olahraga" menunjukkan bahwa olahraga, khususnya sepak bola Brasil dan Argentina, telah menjadi pintu masuk awareness publik Indonesia terhadap Amlatkar, namun belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai sektor kerja sama strategis karena prioritas publik masih didominasi perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mereposisi olahraga dari sekadar hiburan menjadi instrumen diplomasi publik yang konkret dan berkelanjutan, dengan menjadikan Brasil, Argentina, dan Meksiko sebagai pintu masuk utama, mengoperasionalisasikan kerja sama olahraga melalui roadmap Indonesia–Amlatkar 2026–2032, serta memosisikan pencak silat, bulu tangkis, sepak takraw, sepak bola, dan e-sports sebagai aset diplomasi budaya menuju penguatan positioning Indonesia sebagai hub diplomasi olahraga Global South.

I. Latar Belakang

Indonesia tengah memperluas diversifikasi kemitraan strategis ke kawasan Amlatkar dan Kanada sebagai bagian dari strategi de-risking dari ketergantungan pasar tradisional. Survei BSKLN Pengenalan dan Proyeksi Kemitraan Strategis Indonesia dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Kanada mencatat bahwa 96,5% responden menilai Kanada berpotensi besar sebagai mitra diversifikasi Indonesia, dan 97,8% responden memandang kerja sama CEPA dengan Amerika Latin menguntungkan.

Namun demikian, prioritas kebijakan publik masih sangat berorientasi ekonomi — perdagangan dan investasi menempati posisi tertinggi dalam prioritas kerja sama, baik untuk Amlatkar (z-score 1,99) maupun Kanada (z-score 2,31) — sementara dimensi soft power seperti olahraga dan budaya belum menjadi arus utama wacana publik.

Sementara berdasarkan survei tersebut: publik Indonesia mengenal Amerika Latin dan Karibia salah satunya lewat olahraga (olahraga populer dikenal oleh 50,0% responden, peringkat ke-3 dari seluruh aspek yang diketahui), namun terdapat kesenjangan antara pengenalan tersebut dan ekspektasi kerja sama publik. Ketika ditanya sektor prioritas kerja sama, publik justru menempatkan olahraga dan seni budaya (19,0%) jauh di bawah perdagangan dan investasi (58,8%).

Dengan kata lain, olahraga sudah menjadi pintu masuk pengenalan (awareness), tetapi belum dipersepsikan publik sebagai jalur kerja sama strategis. Kesenjangan inilah yang perlu dijembatani melalui narasi diplomasi publik untuk menghubungkan dan amplify modal olahraga dengan manfaat ekonomi dan diplomatik yang lebih dipahami dan diprioritaskan masyarakat.

II. Pembahasan/Substansi

Data menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara tingkat pengenalan (awareness) masyarakat terhadap aspek olahraga di kawasan mitra dengan prioritas kerja sama yang mereka pilih. Brasil merupakan negara Amerika Latin yang paling dikenal (87,2%) sekaligus paling dipersepsikan sebagai mitra strategis utama (64,2%), diikuti Meksiko dan Argentina.

- Awareness dan pengetahuan kekuatan olahraga dari negara-negara Amlatkar (khususnya sepak bola Brasil dan Argentina) belum sepenuhnya dikonversi menjadi dukungan bagi olahraga sebagai jalur kerja sama strategis.
- Kesenjangan ini menjadi ruang kerja bagi diplomasi publik: mengangkat narasi olahraga dari sekadar "hiburan" menjadi "instrumen strategis" di benak publik dan pemangku kepentingan.

Kerja sama strategis juga dipengaruhi oleh hambatan struktural seperti jarak geografis, perbedaan regulasi/standardisasi, bahasa:

- Survei mengonfirmasi jarak geografis sebagai hambatan utama kemitraan dengan Amlatkar (64,6%) diikuti oleh perbedaan regulasi/standardisasi.
- Temuan ini sejalan dengan hambatan yang diidentifikasi dalam FGD—bahasa Spanyol/Portugis, jarak, dan perbedaan waktu—yang menegaskan perlunya strategi soft power berbasis kesinambungan program dan kolaborasi mitra lokal, bukan aktivitas satu kali (one-off event).

Hasil survei dan diskusi dalam FGD juga telah mengidentifikasi sejumlah ruang bagi Indonesia untuk memanfaatkan popularitas olahraga sebagai penguat/amplifier agenda kerja sama yang konkret, lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak, dalam perumusan agenda dan strategi diplomasi Indonesia. Optimalisasi sejarah dan hubungan antar masyarakat, diplomasi ekonomi berbasis olahraga, dan pemanfaatan kanal digital, merupakan sejumlah strategi yang dapat dipertimbangkan.

III. Rekomendasi Strategis

Penguatan fondasi kelembagaan dan narasi merupakan prasyarat utama agar diplomasi olahraga Indonesia berjalan lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Penguatan ini diperlukan untuk memastikan setiap program tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar diplomasi publik, nation branding, dan kerja sama konkret dengan negara mitra. Beberapa langkah rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi opsi adalah:

- Menyusun dan mengimplementasikan suatu roadmap Diplomasi Olahraga Indonesia–Amlatkar 2026–2032 yang memuat visi, prioritas, target, dan peta jalan lintas sektor, sebagaimana kebutuhan untuk menjadikan olahraga sebagai instrumen diplomasi publik, nation branding, penguatan people-to-people contact, serta perluasan kerja sama ekonomi, budaya, dan pariwisata dengan kawasan Amlatkar.
- Mengoptimalkan basis historis dan people-to-people contact dalam narasi publik seperti momentum historis kunjungan Presiden Soekarno ke Brasil, Argentina, dan Meksiko pada 1959 serta GANEFO 1963, disertai penguatan rekam jejak kerja sama kontemporer.
- Meluncurkan kampanye narasi publik (digital-first, memanfaatkan berita online dan media sosial yang menjadi kanal informasi dominan) untuk mereposisi olahraga sebagai amplifier diplomasi ekonomi dan citra bangsa, bukan sekadar hiburan.
- Memulai kerja sama olahraga fokus pada Brasil, Argentina, dan Meksiko — tiga negara dengan awareness dan persepsi mitra strategis tertinggi — melalui pertukaran pelatih, kamp pelatihan, dan promosi pencak silat/bulu tangkis.

Operasionalisasi fondasi kelembagaan dan narasi diplomasi olahraga dalam program konkret yang terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di berbagai kawasan mitra. Pendekatan ini perlu diarahkan pada penguatan jejaring lokal, serta integrasi diplomasi olahraga dengan agenda ekonomi, pariwisata, budaya, dan diplomasi digital. Beberapa strategi kebijakan yang dapat ditempuh adalah:

- Mengoperasionalisasikan MoU olahraga yang sudah ada ke dalam program tahunan terukur, termasuk indikator kinerja untuk pertukaran atlet, event bersama, dan volume sport tourism (MoU Indonesia – Argentina 2009; MoU Indonesia – Kuba 2013; MoU Indonesia – BRICS 2025).
- Menyiapkan Indonesia sebagai warm-weather training base camp bagi atlet Amlatkar ataupun kawasan lain menuju Olimpiade Brisbane 2032, didukung SOP penerimaan atlet asing, kebijakan visa, dan protokol penyelenggaraan event yang jelas untuk menjaga kredibilitas Indonesia.
- Mengembangkan jalur diplomasi olahraga yang menggabungkan pendidikan dan olahraga (beasiswa atlet, sport science, pelatihan kepelatihan) dengan negara Amlatkar, selaras dengan persepsi publik bahwa Amlatkar adalah salah satu mitra pendidikan olahraga utama Indonesia.
- Mengintegrasikan e-sports dan komunitas digital Indonesia ke dalam strategi diplomasi digital dan ekonomi kreatif berbasis generasi muda. Besarnya basis penggemar olahraga digital di Indonesia, khususnya sepak bola, dapat dikembangkan sebagai ruang diplomasi digital dan ekonomi kreatif.

Pada jangka panjang, diplomasi olahraga perlu diarahkan untuk memperkuat positioning global Indonesia sebagai aktor Global South yang mampu menghubungkan agenda olahraga, budaya, ekonomi kreatif, dan people-to-people contact. Upaya ini penting agar olahraga tidak hanya menjadi instrumen promosi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nation branding dan peningkatan pengaruh Indonesia.

- Memposisikan Indonesia sebagai hub diplomasi olahraga Global South dengan pencak silat, bulu tangkis, dan sepak takraw sebagai aset diplomasi budaya unggulan yang dipromosikan berkelanjutan.
- Mengintegrasikan aset olahraga nasional ke dalam indeks soft power dan strategi nation branding Indonesia secara lintas sektor, memastikan olahraga sejajar dengan sektor ekonomi dalam prioritas kebijakan luar negeri.
- Membangun ekosistem diplomasi olahraga Indonesia–Amlatkar melalui forum tahunan, jejaring akademi olahraga dan sport science, serta flagship event berkala yang mempertemukan pemerintah, federasi olahraga, klub, akademi, pelaku industri, sektor pariwisata.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kuesioner Kementerian Luar Negeri

Survei yang tersedia:

BSKLN - Survey Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi

https://survey.kemlu.go.id/

POLICY BRIEF

KEBIJAKAN LOCAL CURRENCY TRANSACTION (LCT) SEBAGAI INSTRUMEN STRATEGIS BAGI INDONESIA

DISETUJUI UNTUK PUBLIKASI

Ringkasan Eksekutif

Perubahan lanskap geopolitik global telah meningkatkan penggunaan instrumen ekonomi dan finansial sebagai alat proyeksi kekuatan dan tekanan politik. Dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global selama beberapa dekade menjadi pilar stabilitas perdagangan internasional. Tetapi kini cenderung menjadisumber kerentanan strategis bagi banyak negara,khususnya negara berkembang. Dalam konteks ini, kebijakan *Local Currency Transaction* (LCT) Indonesia perlu disikapi sebagai instrumen strategis memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Resiliensinya diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mengurangi kerentanan terhadap volatilitas eksternal. Apalagi doktrin *dynamic resilience* telah diintrodusir Menteri Luar Negeri RI. Cara pandang ini menghendaki advokasin bergerak dari *position of strength* menjadi sesuatu yang mutlak.

I. Latar Belakang

1. Lanskap keuangan global mengalami transformasi signifikan. Meningkatnya upaya de-dolarisasi yang dipimpin berbagai negara, khususnya blok BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) menandai transformasi tersebut. Meskipun diakui dolar AS masih mendominasi 57% cadangan devisaglobal per 2025. Tetapi tekanan geopolitik dan sanksi ekonomi mendorong negara-negara mencari alternatif pembayaran menggunakan mata uang lokal.
2. Sebagai respons terhadap dinamika itu, sejumlah negara mulai mengembangkan mekanisme alternatif pembayaran berbasis mata uang lokal. Inisiatif ini didorong kebutuhan untuk mengurangi risiko nilai tukar. Tujuan utamanya meningkatkan efisiensi perdagangan bilateral dan menguatkan kedaulatan ekonomi. Upaya itu disadari membawa implikasi geopolitik dan tantangan tidak mudah.
3. Satuan Tugas Nasional *Local Currency Transaction* (Satgas Nasional LCT) Indonesia telah mengimplementasikan skema pembayaran bilateral menggunakan mata uang lokal. Implementasi itu dilakukan dengan enam negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Per-November 2025, LCT Indonesia mencatat transaksi senilai ekuivalen USD 22,19 miliar dengan pertumbuhan 36% year-to-date. Transaksi melibatkan rata-rata 9.289 pengguna bulanan.
4. Kebijakan ini memerlukan pengelolaan narasi dan diplomasi yang cermat. agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, menjaga kredibilitas Indonesia di tingkat internasional, serta menghindari persepsi bahwa Indonesia tengah mengambil posisi dalam rivalitas geopolitik global.

II. Pengamatan

5. Beberapa negara atau organisasi internasional lainnya terlihat mulai mengurangi pemakaian dolar AS antara lain:

   → **BRICS**

   Negara-negara BRICS secara konsisten meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan kerja sama keuangan mereka. Pendekatan yang digunakan bersifat pragmatis dan bertahap, dengan fokus pada efisiensi ekonomi dan stabilitas keuangan. Blok BRICS telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, meliputi:

   a) Perjanjian *Currency Swap* antara Brazil-Tiongkok (USD 30 miliar, 2013), memfasilitasi perdagangan bilateral tanpa intermediasi dolar;

   b) *New Development Bank* (NDB) yang didirikan pada 2014, meningkatkan pinjaman dalam mata uang lokal untuk menghindari risiko utang berdenominasi dolar;

   c) *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS) Tiongkok menghubungkan sekitar 4.800 bank di 180 negara dengan ribuan

partisipan tidak langsung (Per-Januari 2025);
d) *BRICS Pay* sebagai Sistem pembayaran terdesentralisasi berbasis *blockchain* yang dibahas di KTT Kazan Oktober 2024, dan hingga kini masih tahap pengembangan.

Catatan: Akibat sanksi, Rusia dan Tiongkok melaporkan sekitar 90% pembayaran perdagangan bilateral mereka menggunakan Rubel dan RMB pada 2025. Mesir mengonfirmasi peningkatan penggunaan *settlement* mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara BRICS pada Juli 2025. Negara anggota BRICS lainnya masih tetap berhati-hati dalam rencana mencari alternatif mata uang internasional selain dolar. Belum ada kemajuan penting di luar negara yang sudah memutuskan karena kemungkinan tekanan geopolitik terhadap mereka yang ingin melakukan de-dolarisasi.

→ **Libya dan African Union**
Pada 2009, Ketua Uni Afrika, Muammar Gaddafi ketika itu mengusulkan negara-negara Afrika beralih ke mata uang baru Gold Dinar dari dolar AS. Inisiatif ini berupaya mengalihkan pendapatan minyak ke dana yang dikendalikan negara dan bukan bank-bank Amerika. Caranya tentu dengan menghentikan penggunaan dolar untuk transaksi minyak.

Saat itu, Libya dilaporkan memiliki143 ton cadangan emas dan jumlah serupa dalam perak yang potensi mendukung mata uang Pan-Afrika. Rencana untuk membangun mata uang tunggal Afrika sejak 2004 pada 2023 namun tidak terealisasi. Pengalaman Libya mendorong inisiatif keuangan alternatif di Afrika memberikan pelajaran penting mengenai risiko de-dolarisasi yang dilakukan secara prematur dan politis.

Penggantian Dolar AS sebagai mata uang untuk transaksi internasional merupakan isu sensitif yang dapat memicu respons geopolitik yang keras, sehingga penting untuk penggunaan retorika yang tidak konfrontatif terhadapat sistem moneter yang ada sehingga tidak kontraproduktif terhadap kepentingan nasional Indonesia.

→ **Negara-negara Lainnya**
Sejumlah negara seperti Rusia, Tiongkok, Iran dan beberapa negara Global South lebih mengutamakan penggunaan mata uang lokal. Mekanisme pembayaran non-dolar merupakan respons terhadap tekanan eksternal, terutama sanksi ekonomi dan pembatasan akses sistem keuangan global. Dalam jangka pendek, kebijakan ini terbukti meningkatkan ketahanan transaksi perdagangan dan menjaga keberlanjutan hubungan ekonomi dengan mitra tertentu.

Kebijakan ini membantu menjaga keberlanjutan perdagangan dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan yang didominasi oleh dolar. Meski demikian, kebijakan itu juga menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan likuiditas dan peningkatan biaya transaksi. RRT misalnya berusaha mengurangi ketergantungan dolar dan mengintegrasikan Renminbi (RMB) ke pasar internasional dan membuat RMB menarik bagi pasar global. Rusia juga terus melakukan mengurangi ketergantungan dolar karena rezim sanksi yang berlaku. Rusia banyak melakukan transaksi menggunakan RMB dan rubel dan menggatikan cadangan devisa dengan emas.

Penggunaan mata uang lokal yang dipaksakan tanpa kesiapan pasar dapat menurunkan daya saing perdagangan dan membebani pelaku usaha. Pembelajaran penting bagi Indonesia adalah bahwa LCT harus dirancang sebagai instrumen mitigasi risiko. Bukan sebagai substitusi total terhadap sistem moneter global yang ada. Dalam hal ini, diversifikasi mata uang perlu diimbangi penguatan infrastruktur keuangan. Ditopang peningkatan literasi pelaku usaha dan diplomasi ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional maupun keterhubungan Indonesia dengan sistem keuangan global.

III. Rekomendasi Kebijakan

6. Indonesia memiliki posisi unik dalam lanskap geopolitik de-dolarisasi. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia berkepentingan dalam diversifikasi sistem keuangan global. Hal itu dilakukan tentu dengan tetap menjaga hubungan konstruktif dengan semua pihak dalam konteks politik luar negeri bebas-aktif. Wacana posisi Indonesia dalam konteks de-dolarisasi adalah pragmatisme non-blok yang menghindari konfrontasi langsung terhadap kepentingan pemain utama dunia. Sehingga dapat dikatakan LCT merupakan instrumen khusus bentuk diversifikasi dan bukan substitusi total sistem keuangan global.
7. Kebijakan LCT seyogyanya merefleksikan kepentingan Indonesia memperkuat ketahanan ekonomi nasional tanpa menimbulkan risiko geopolitik. LCT diposisikan sebagai instrumen teknis mengurangi risiko nilai tukar, menurunkan biaya transaksi, serta memperdalam kerja sama ekonomi dengan mitra strategis, khususnya di kawasan dan *Global South.*
8. Pengembangan LCT memerlukan koordinasi kuat antara kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri. Apalagi implementasi LCT memiliki dimensi politik luar negeri yang tidak dapat diabaikan, terutama terkait persepsi internasional, rezim sanksi, dan dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, kepentingan utama Indonesia adalah memastikan bahwa pengembangan LCT tetap selaras dengan prinsip bebas aktif. Langkah itu dijalankan secara bertahap dan non-konfrontatif. Ia juga dikawal melalui diplomasi ekonomi yang mampu menjaga

keseimbangan antara otonomi kebijakan nasional dan keterhubungan Indonesia dengan sistem keuangan global.

9. Program LCT Indonesia berada dalam posisi lebih menguntungkan karena sifatnya yang bilateral, pragmatis, dan fokus pada efisiensi ekonomi. Namun pembelajaran dari pengalaman global menggarisbawahi perlunya pendekatan hati-hati dan bertahap dalam mengembangkan kerja sama pembayaran mata uang lokal dengan cara-cara seperti al:

   → Menempatkan LCT sebagai instrumen ekonomi yang bersifat fungsional dan non-politis. Prinsipnya, LCT merupakan instrumen efisiensi ekonomi dan stabilitas nilai tukar, bukan gerakan anti-dolar. Dalam pendekatan ini, perluasan LCT tepat dilakukan melalui kerja sama antarbank sentral, penguatan infrastruktur sistem pembayaran, serta fasilitasi perdagangan dan investasi dengan mitra yang memiliki kepentingan ekonomi sejalan.

   → Pengembangan LCT dengan negara-negara kawasan dan *Global South* yang memiliki intensitas perdagangan tinggi serta sensitivitas geopolitik lebih rendah. Strategi ini memungkinkan Indonesia membangun skala ekonomi LCT secara bertahap, memperkuat kepercayaan pasar, dan menguji kesiapan institusional sebelum ekspansi lebih luas.

   → Indonesia juga perlu melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dengan berbagai negara-negara barat untuk menjelaskan tujuan dan mekanisme LCT. LCT perlu ditegaskan sebagai instrumen ketahanan ekonomi dan manajemen risiko eksternal, bukan sebagai upaya de-dolarisasi.

10. Kementerian Luar Negeri memiliki peran strategis menjelaskan dimensi geopolitik LCT, khususnya melalui penyelarasan narasi kebijakan eksternal dengan Bank Indonesia dan kementerian/lembaga terkait. Diplomasiekonomi perlu diarahkan untuk memastikan bahwa setiap perluasan kerja sama LCT mempertimbangkan sensitivitas politik, rezim sanksi internasional, serta persepsi mitra strategis.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kuesioner Kementerian Luar Negeri

Survei yang tersedia:

BSKLN - Survey Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi

https://survey.kemlu.go.id/